

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan pada posisi 2° 05' LU - 3° 05' LS dan 108° 0' BT - 114° 10' BT. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Bagian barat berbatasan dengan Natuna dan Selat Karimata;
- b. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur);
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
- d. Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 147.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 kilometer dan sekitar 850 kilometer dari barat ke timur. Bagian lain adalah perairan laut yang mempunyai puluhan pulau-pulau. Pulau-pulau besar adalah Pulau Karimata dan Pulau Maya. Dilihat dari besarnya wilayah,



maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (309.934,4 Km²) dan Kalimantan Tengah (157.183 Km²). Secara Administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 Desa, sedangkan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat berjumlah sekitar 5.069.127 jiwa, yang terdiri dari 2.762.930 jiwa atau 51,55% berjenis kelamin laki-laki dan 2.602.034 jiwa atau 48,45% berjenis kelamin perempuan.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: Sungai Melawi, (dapat dilayari 471 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Sekadau (117 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Landak (178 km). Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti, Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru (Jatim, 3.676 M) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 M). Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat,



ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter . Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera. Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley



dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Pada umumnya di Kalimantan Barat suhu udara yang tinggi biasa diikuti oleh kelembaban udara yang tinggi pula. Umumnya suhu udara di Kalimantan Barat cukup normal namun bervariasi, yaitu rata-rata sekitar 200 sampai dengan 35⁰C. Kecepatan angin rata-rata di Kalimantan Barat, berkisar antara 2-8 knot/jam. Sedangkan angin rata-rata bulanan sekitar 2 knot/jam. Kecepatan angin yang relative tinggi sering terjadi antara bulan Oktober-Maret, seiring dengan musim penghujan. Kalimantan Barat cukup dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Secara umum mempunyai curah hujan tahunan di atas 3.000 milimeter dan hampir merata diseluruh Kabupaten/Kota. Intensitas hujan yang tinggi, biasanya saling mempengaruhi terhadap kecepatan angin. Faktor angin ini sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan dan kegiatan nelayan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh daerahnya yang berhutan tropis yang lebat dan disertai dengan kelembaban udara yang tinggi. Angin kencang yang secara temporer biasanya terjadi di laut dengan kecepatan dapat mencapai 30-60 knot/jam.

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social. **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-



benda angkasa. **Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek **tanggap darurat**, tetapi lebih menekankan pada **keseluruhan manajemen risiko bencana**. Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana serta 3 buah peraturan turunannya, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana ditingkat pusat dan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah . Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8



Tahun 2016, disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sejak dibentuknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat secara optimal telah melaksanakan tugas pokok, fungsi serta peranannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, tentunya masih banyak hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Berkaitan dengan sebagian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat memiliki potensi bencana dengan Indeks Rawan Bencana tinggi atau sebagai kawasan rawan bencana, maka Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kedepan, guna meminimalkan risiko terhadap ancaman kejadian bencana, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta komitmen yang kuat dari semua pihak.

Untuk mengoptimalkan kinerja penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, maka pembangunan bidang kebencanaan diarahkan untuk :

- a. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana kedalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah;
- b. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusakan sosial; serta



- c. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026, yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. RENSTRA ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan RENSTRA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.

Dalam RENSTRA ini, dijabarkan rencana pembangunan yang memuat isu strategis/permasalahan, yang dipecahkan melalui indikator dan target penentu keberhasilan mulai dari indikator dan target OPD, program serta kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan. Selanjutnya RENSTRA ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Barat serta rencana aksi masing masing Bidang dalam penanganan bencana tahun 2024, 2025 dan 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);



- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



- 11) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);



- 19) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 21) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumberdaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat;
- 22) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 23) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
- 24) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 3 (tiga) tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang strategis dalam kurun waktu selama tiga tahunan melalui berbagai sumber pembiayaan yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada setiap akhir Tahun Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berisi uraian pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah, adapun susunan garis besar isi dokumen Rencana Strategis yaitu antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat., urusan pemerintahan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat adalah “SUB URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA” dimana urusan tersebut termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

- 1). Sub Koordinator Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- 2). Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 3). Sub Koordinator Keuangan dan Asset;



Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala atau Jabatan Fungsional tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

- 1). Sub Koordinator Pencegahan;
- 2). Sub Koordinator Kesiapsiagaan;

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Sub Koordinator yaitu:

- 1). Sub Koordinator Kedaruratan;
- 2). Sub Koordinator Logistik;

Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Sub Koordinator yang terdiri dari:

- 1). Sub Koordinator Rehabilitasi;
- 2). Sub Koordinator Rekonstruksi;

Masing-masing Sub Koordinator di dipimpin oleh seorang Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

f. Unit Pelaksana Teknis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Unit Pelaksana Teknis.



g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

BPBD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk melaksanakan tugasnya BPBD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, maka susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

a) Kepala Badan



Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Penetapan program kerja di bidang penanggulangan dan bencana daerah;
- Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pembinaan dan mengarahkan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyelenggaraan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Tugasnya menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi,



administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di BPBD. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja dilingkungan sekretariat;
- Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di BPBD;
- Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan BPBD;
- Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BPBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi 1(satu) orang Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) orang Sub Koordinator Kegiatan yang terdiri dari:



(1) Sub Koordinator Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Sub Koordinator Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan BPBD;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BPBD;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian umum dan aparatur;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

(3) Sub Koordinator Keuangan dan Asset

Sub Koordinator Keuangan dan Asset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan BPBD serta mengendalikan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Keuangan dan Asset mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;



- Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan urusan di bidang Keuangan dan Aset di lingkungan BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian Keuangan dan Aset;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Tugasnya menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
- Pengkoordinasian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;



- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Sub Koordinator berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari :

(1) Sub Koordinator Pencegahan

Sub Koordinator Pencegahan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Pencegahan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan bencana;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;



- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang pencegahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Koordinator Kesiapsiagaan

Sub Koordinator Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kebakaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan dan kebakaran;
- pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesiapsiagaan dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan dan kebakaran;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang kesiapsiagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

d) Bidang Kedaruratan dan Logistik



Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Tugasnya menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugasnya bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan bencana;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik bencana;
- Pengkoordinasian di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Sub Koordinator berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari :

(1) Sub Koordinator Kedaruratan

Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Tugasnya mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai



dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Koordinator Kedaruratan mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan di bidang kedaruratan;
- pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kedaruratan;
- pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kedaruratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kedaruratan;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang kedaruratan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Koordinator Logistik

Sub Koordinator Logistik dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik penanggulangan bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugasnya Sub Koordinator Logistik mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan di bidang logistik;
- pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang logistik penanggulangan bencana;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang logistik penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan;



- pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang logistik penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Tugasnya membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk menjalankan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi bencana;
- Pengkoordinasian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;



- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Sub Koordinator berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari :

(1) Sub Koordinator Rehabilitasi

Sub Koordinator Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugasnya Sub Koordinator Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan seksi rehabilitasi;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi bencana;
- pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rehabilitasi bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Koordinator Rekonstruksi

Sub Koordinator Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan



perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk menjalankan tugasnya Sub Koordinator Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan seksi rekonstruksi;
- pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi bencana;
- pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rekonstruksi bencana;
- pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rekonstruksi bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rekonstruksi bencana;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rekonstruksi bencana;
- pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rekonstruksi bencana;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang rekonstruksi bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Keberadaan pemegang jabatan fungsional di BPBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2023 terdiri dari :

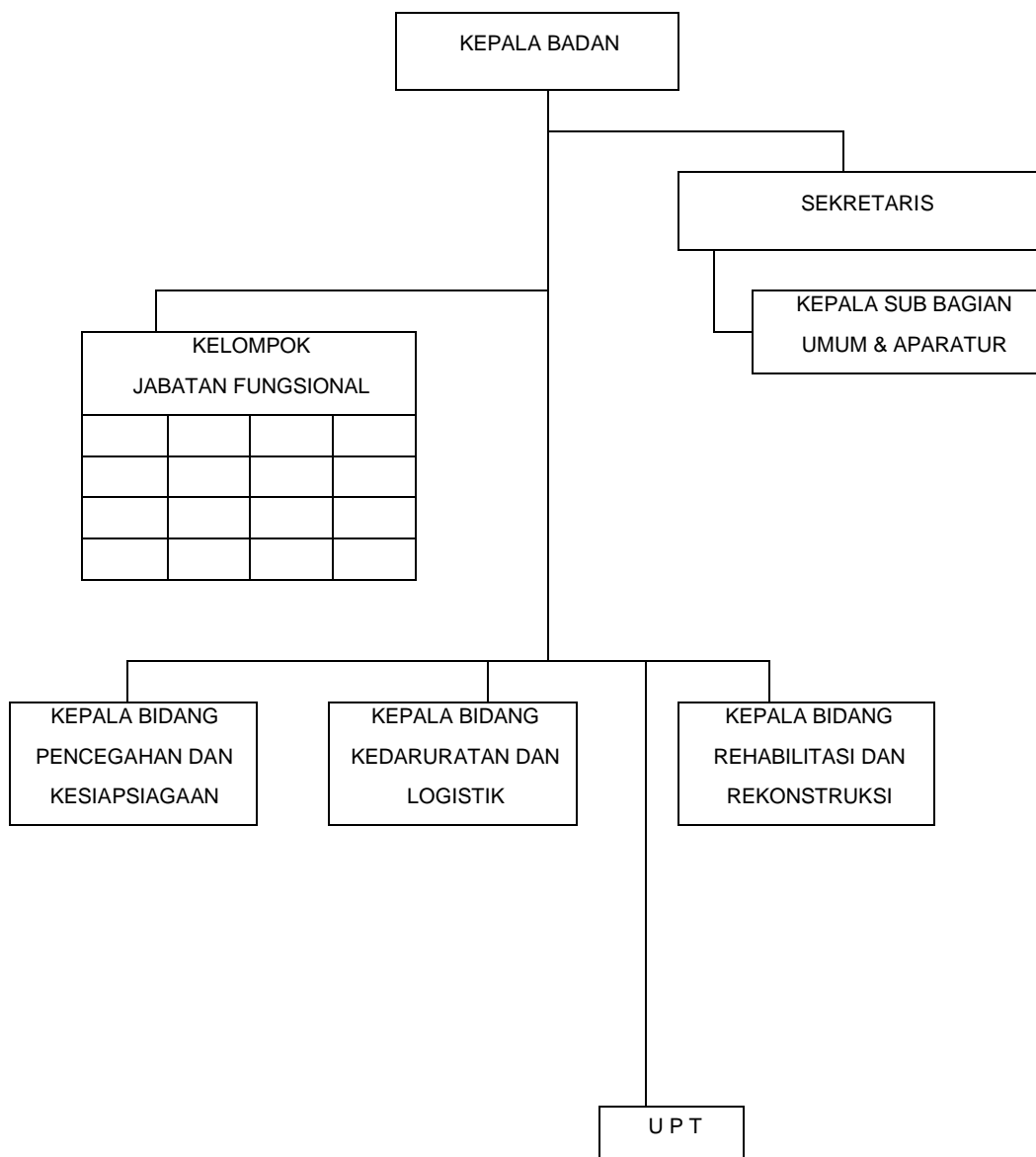
1. Analis Kebijakan
2. Penata Penanggulangan Bencana
3. Analis Kebencanaan
4. Arsiparis

g) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat



2.2 . Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2020 didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	8	2	10



No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
2.	Sarjana	14	4	18
3.	Diploma III	4	0	4
4.	SLTA	4	3	7
J U M L A H		30	9	39

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	0	0
4.	Pembina (IV/a)	5	0	5
5.	Penata Tingkat I (III/d)	11	4	15
6.	Penata (III/c)	4	1	5
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	2	8
8.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	0	1
10.	Pengatur (II/c)	2	0	2
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
12.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
J U M L A H		31	8	39

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

Tabel 2.3. Pejabatan Struktural

NO	ESELON / NAMA	PENDIDIKAN	GOL / RUANG	JABATAN
I ESELON II.a				
1.	Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE., ME	S 2	IV/d	Kepala Badan
II ESELON III.a				
1.	RIDWAN., ST., MM	S 2	IV/A	Sekretaris
2.	JUDAN, S.Pd, M.Pd.	S 2	IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	NOVEL UMAR, ST	S 1	IV/A	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
4.	GABRIEL IRMAWAN NUGROHO, SE	S 1	IV/a	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
III ESELON IV.a dan Jabatan Fungsional Tertentu				



NO	ESELON / NAMA	PENDIDIKAN	GOL / RUANG	JABATAN
1.	SUPRIYONO, SSTP, M.Si	S 2	IV/a	Sub Koordinator Renja dan Monev
2.	HASANAH, S. Sos.	S 1	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
3.	HERCULANUS, A.Md	D III	III/d	Sub Koordinator keuangan dan Aset
4.	EDI SUSANTO, S.P.	S 1	III/c	Sub Koordinator Pencegahan
5.	EDDY JANUARDI, S.IP	S 1	III/d	Sub Koordinator Kesiapsiagaan
6.	Drs. TUGIYANTO	S 1	III/d	Sub Koordinator Kedaruratan
7.	LUMUMBA SIANTURI, SH, MH.	S 2	III/d	Sub Koordinator Rehabilitasi
8.	NOGI SUMARSONO, A.Md	D III	III/d	Sub Koordinator Rekonstruksi

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

Untuk posisi Jabatan Fungsional tertentu saat ini belum ada, yang ada saat ini hanya Jabatan Fungsional Umum yaitu sebanyak 27 orang PNS.

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja BPBD Provinsi Kalbar. Pada Tahun Anggaran 2020, BPBD Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.8.920.916.130,20** untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Program	Anggaran	Ket
1). Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.796.674.714,00	APBD
2). Penanggulangan Bencana	Rp. 7.443.520.550,00	APBD
3). Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 489.998.300,00	APBD
TOTAL	Rp. 15.730.193.564,00	APBD

Sumber : Subbag Keu & Aset BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023



Saat ini sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum mencukupi dan representative untuk ukuran suatu instansi teknis. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Gedung Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati Gedung ex Kantor Samsat/Dispenda dan ex kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jl. Adi Sucipto Km. 3,5 Nomor 50 Pontianak, namun selain itu masih terdapat gedung lain yang belum dioperasikan yang terletak di Jl. Adisucipto KM. 9,2 Kubu Raya (dibelakang kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat) yang kondisinya saat ini belum layak untuk digunakan.

2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar sampai dengan akhir tahun 2023 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	Masin Ketik	2	Unit	Baik
2.	Kalkulator	3	Buah	Baik
3.	Lemari Besi	10	Buah	Baik
4.	Rak Besi	18	Buah	Baik
5.	Filling Cabinet	11	Buah	Baik
6.	Brankas	2	Buah	Baik
7.	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
8.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik
9.	Lemari Buku	2	Buah	Baik
10.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
11.	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
12.	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
13.	Papan Absen	1	Buah	Baik
14.	Whiteboard	2	Buah	Baik
15.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
16.	Kursi besi	85	Buah	Baik
17.	Kursi Putar	40	Kursi Putar	Baik
18.	Kursi Kerja Eselon II	5	Buah	Baik
19.	Kursi Hadap	10	Buah	Baik
20.	Meja Rapat	1	Buah	Baik
21.	Meja ½ biro	80	Buah	Baik
22.	Tikar/Karpet	1	Set	Baik
23.	Sofa	2	Set	Baik
24.	Meja Direksi	5	Buah	Baik
25.	Jam dinding	3	Buah	2 Rusak
26.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik
27.	Lemari Es	2	Unit	Baik
28.	AC Split	32	Unit	Baik
29.	Exhause Fan	1	Unit	Baik
30.	Televisi	2	Unit	Baik
31.	Amplifire	1	Unit	Baik
32.	Equalizer	1	Unit	Baik
33.	Load speaker	2	Set	Baik
34.	Wireless	1	Unit	Baik
35.	Megaphone	1	Unit	Baik
36.	Lambang Burung Garuda	2	Buah	Baik
37.	Tangga Alumunium	2	Buah	Baik
38.	Dispenser	4	Unit	Baik
39.	Handy Camp	1	Unit	Baik
40.	CCTV	1	Set	Baik
41.	Penguat Sinyal Internet	4	Set	Baik
42.	Kompute PC	16	Set	Baik
43.	Laptop	19	Unit	Baik
44.	Ploter/Printer Peta	1	Unit	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
45.	Hardisk External	4	Buah	Baik
46.	Printer Komputer	22	Unit	Baik
47.	Projektor	1	Unit	Baik
48.	UPS	18	Unit	Baik
49.	Kamera Film	2	Unit	Baik
50.	Pesawat Telepon	6	Unit	Baik
51.	Faximile	3	Unit	Baik
52.	Peta	1	Paket	Baik
53.	Perlengkapan Tenis Meja	1	Set	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

3) Peralatan Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan tupoksinya sebagai unit penanggulangan bencana, tentunya ada beberapa peralatan bencana yang terdapat di BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun peralatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6. berikut ini :

Tabel 2.6. Peralatan Penanggulangan Bencana

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	GPS	1	Unit	Baik
2.	Chainshaw	2	Unit	Baik
3.	Genset	4	Unit	Baik
4.	Alat Pemadam Portable	3	Unit	Baik
5.	Solar Cell Mini	7	Unit	Baik
6.	Solar Hendle Lamp	20	Unit	Baik
7.	Pompa Air	29	Unit	Baik
8.	Velbed	50	Unit	Baik
9.	Lampu Senter HID Serach Light	2	Unit	Baik
10.	Handy Talky (HT)	14	Unit	Baik
11.	Unit Transceiver SSB	2	Unit	Baik
12.	SSB Portable	1	Unit	Baik
13.	Guri Tower	1	Unit	Baik
14.	RIG	2	Set	Baik
15.	Raw Water Kit	1	Unit	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
16.	SAR Toolkit	5	Unit	Baik
17.	Baju Anti Api	3	Stel	Baik
18.	Sepatu Anti Api	3	Pasang	Baik
19.	Helm Pemadam Kebakaran	3	Buah	Baik
20.	Sarung Tangan Anti Api	3	Pasang	Baik
21.	Pompa Punggung	4	Unit	Baik
22.	Tenda Posko	1	Unit	Baik
23.	Tenda Pengungsi	5	Unit	Baik
24.	Tenda Keluarga	20	Unit	Baik
25.	Flexible Tank Cap 1000 ltr	2	Unit	Baik
26.	Flexible Tank Cap 2000 ltr	2	Unit	Baik
27.	Water Treatment Portable	5	Unit	Baik
28.	Water Treatment Mini	50	Unit	Baik
29.	Light Power Portable	1	Unit	Baik
30.	Pompa Portable	6	Pcs	Baik
31.	Roll Suction Hone 2,5" @Gm	1	Roll	Baik
32.	Battery Chareg	1	Pcs	Baik
33.	Floddlight Projector	1	Pcs	Baik
34.	Operation Manual	1	Pcs	Baik
35.	"AP" Fire Hydrant Equipment Fire Hose 2,5 x 20 m	36	Roll	Baik
36.	Fire Hose 1,5 x 20 m	24	Roll	Baik
37.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Forked Joint Siamese 2,5 x 1,5 x 1,5"	6	Pcs	Baik
38.	"TFT FIRE" Fighting Equipment Twister Series, Dual Gallonage Nozzle F2060 Complete with sniper Gun Capacity 75 & 230 LPM, Coupling 1,5"	12	Pcs	Baik
39.	Pompa Portable	3	Unit	Baik
40.	Roll Suction Hose "3" @gM	1	Roll	Baik
41.	Battery Chareg	1	Pcs	Baik
42.	Floddlight Projector	1	Pcs	Baik
43.	Operation Manual	1	Pcs	Baik
44.	"AP" Fire Hydrant Equipment Fire Hose 2,5 x 20 m	30	Roll	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
45.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Branchpipe With Straight Nozzle 2,5"x20m, AC, Gold Colour Machino	6	Pcs	Baik
46.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Forked Joint Siamese 2,5 x 2,5 x 2,5"	3	Pcs	Baik
47.	Direct Valve SRV 2000 Size 3"	3	Unit	Baik
48.	Direct Valve SRV 2000 Size 2.5"	6	Unit	Baik
49.	Aquafast Floating Pump Type B 6 HP - Mesin Pompa Apung Type B6 HP Kapasitas Tekanan 990 Liter/menit - Diffuser Nozlle with sniper gun size 2,5". - Pelampung Pompa	3	Unit	Baik
50.	"AP" Fire Hose size 2,5 x 30 m	9	Roll	Baik
51.	Gepyok	8	Buah	Baik
52.	Kapak Pulasky	8	Buah	Baik
53.	Sekop	8	Buah	Baik
54.	Garu Tajam	8	Buah	Baik
55.	Garu Tumpul	8	Buah	Baik
56.	Helm	60	Buah	Baik
57.	Sarung Tangan	60	Pasang	Baik
58.	Kaos BNPB	100	Pcs	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset Sekretariat BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

4) Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan atau mobilitas pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat terbagi dua yaitu kendaraan untuk penanggulangan bencana dan kendaraan operasional untuk mendukung tugas administrasi kantor, sebagaimana terinci pada Tabel 2.7. di bawah ini:

Tabel 2.7. Sarana Kendaraan

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
I	Kendaraan Operasional			
1.	Mobil Honda CRV	1	Unit	Baik
2.	Mobil Honda Jazz	1	Unit	Baik
3.	Mobil Chavrolet Colorado LTZ (Komando)	1	Unit	Baik
4.	Motor Yamaha Yupiter Z	2	Unit	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
5.	Motor Honda Supra X 125	3	Unit	Baik
6.	Motor Honda Blade	2	Unit	Baik
7.	Motor Honda Mega Pro	1	Unit	Baik
II	Kendaraan Penanggulangan Bencana			
1.	Mobil Mitsubishi Strada (Rescue)	1	Unit	Baik
2.	Mobil Isuzu NKR (Ambulance)	1	Unit	Baik
3.	Mobil Hino Dutro (Komunikasi Satelit)	1	Unit	Baik
4.	Mobil Isuzu NKR (Pengolah Air Bersih)	1	Unit	Baik
5.	Mobil Tangki Air	1	Unit	Baik
6.	Mobil Isuzu Panther (Logpal)	1	Unit	Baik
7.	Mobil Mitsubishi FE (Dapur Lapangan)	1	Unit	Baik
8.	Mobil Isuzu NKL (Toilet L/P)	1	Unit	Baik
9.	Mobil Truck Serba Guna	1	Unit	Baik
10.	Motor Viar Roda Tiga (Pemadam Kebakaran)	1	Unit	Baik
11.	Motor Kawasaki-LX 150 C	6	Unit	Baik
12.	Perahu Karet	4	Unit	Baik
13.	Mesin Perahu 40 PK	1	Unit	Baik
14.	Mesin Perahu kps 25 PK	1	Unit	Baik
15.	Gerobak Tarik (Trolis Speed Boat)	1	Unit	Baik
16.	Speed Boat	1	Unit	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset Sekretariat BPBD Prov. Kalbar Tahun 2023

2.3 . Kinerja Pelayanan SKPD

a. Sekretariat

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8. Capaian Kinerja SKPD Pada Sekretariat

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Pelayanan Surat Menyurat	3 Hr	2 Hr	1 Hr	1 Hr	1 Hr
2. Pelayanan Kepegawaian	3 Hr	2 Hr	1 Hr	1 Hr	1 Hr



3. Pelayanan Keuangan	3 Hr	2 Hr	1 Hr	1 Hr	1 Hr
4. Pelayanan Data dan Informasi Bencana	3 Hr	2 Hr	1 Hr	1 Hr	1 Hr

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.9. Capaian Kinerja SKPD Pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
	2019 s/d 2023
1. Pencegahan Bencana	Mengurangi kerusakan sarana, prasarana dan lingkungan hidup, kerugian harta benda dan korban jiwa
2. Kesiapsiagaan menghadapi Bencana	Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat menghadapi bencana

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Kedaruratan dan Logistik selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.10. Capaian Kinerja SKPD Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
	2019 s/d 2023
1. Penanganan keadaan Darurat Bencana	Pertolongan dan penyelamatan terhadap korban manusia
2. Penanganan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (makan, minum dan kesehatan)

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 2.10. Capaian Kinerja SKPD Pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
	2019 s/d 2023
1. Penanganan Rehabilitasi	Perbaikan kerusakan fisik dan non fisik agar dapat berfungsi kembali
2. Penanganan Rekonstruksi	Pembangunan total terhadap segala kerusakan



2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
- c. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, dan Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah, dimana sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan;
- b. Sudah terbentuknya BPBD diseluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat (kecuali Kabupaten Sambas) sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah;
- c. Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

No	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Sarana dan Prasarana	Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana dan prasarana	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi	Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan kebencanaan
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Sinkronisasi program dan Sinergitas Pembiayaan antara Pusat dan Daerah belum optimal	Penyusunan program dilaksanakan persektor dan tdk terpadu	Adanya Pedoman dan arahan kebijakan secara Nasional dalam penyelenggaraan kebencanaan
3	Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan	Usulan anggaran untuk kebencanaan tidak dikonsultasikan atau dikoordinasikan terlebih dahulu	Adanya Ego Sektoral di masing-masing pihak yang terkait dengan penanganan kebencanaan	Dukungan dan fasilitasi dari Instansi yang menangani kebencanaan
4	Pengelolaan administrasi perkantoran dan aparatur	Kurang mematuhi pedoman tata naskah dinas resmi dan kurangnya pemahaman terhadap aturan serta perundang-undangan yang berlaku	Terbatasnya jumlah aparatur yang ada	Adanya diklat teknis



No	Jenis Pelayanan Publik	Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPBD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
5	Penyusunan Rencana Penanggulangan dan pengurangan resiko Bencana	Terikat dengan paradigma lama dimana bencana ditangani setelah terjadinya bencana	Melibatkan semua pihak terkait dan masih rendahnya tingkat sadar bencana	Adanya Bimbingan teknis serta kejadian bencana semakin meningkat frekwensinya
6	Penetapan standar teknis penanggulangan bencana	Standar teknis bencana kurang diperhatikan dan terkadang cenderung diabaikan	Kurang dipahaminya standar teknis penanggulangan bencana	Sesuatu yang memang dibutuhkan
7	Kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap potensi bencana	Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon	Masyarakat enggan meninggalkan lokasi bencana	Perlunya penyiapan segala peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
8	Peringatan dini Terjadinya bencana	Peringatan dini bencana belum optimal disampaikan secara cepat kepada masyarakat di lokasi bencana	Kejadian bencana terjadi begitu cepat dan mendadak	Pemanfaatan Tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam peringatan dini
9	Penentuan status keadaan darurat bencana	Perlunya data dan informasi dampak bencana yang cepat, lengkap dan akurat	Diperlukan waktu dan kerja keras untuk kumpul data dan informasi	Perlunya Satuan Reaksi Cepat yang terlatih dan lengkap peralatannya
10	Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum	Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mudah terutama yang berdampak sosial ekonomi	Memerlukan Anggaran besar dan kajian teknis Lapangan yang akurat	Dana bantuan dari pemerintah, masyarakat dan pihak swasta

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang tercantum



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka visi pembangunan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur; adalah :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudra, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan sosial yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.
3. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.



5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Berdasarkan keenam misi yang dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah periode 2019 – 2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diamanahkan dalam urusan pemerintahan di bidang Keterntaman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran mengacu pada **MISI KELIMA** pembangunan RPJMD yaitu **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah;
2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan



rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Adapun hasil telaahan terhadap Isu Strategis BNPB dengan Isu Strategis di dalam RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Hasil Telaahan terhadap Renstra BNPB.

Isu – Isu Strategis dalam Renstra BNPB	Isu – Isu Strategis RPD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan Penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ; 2. Belum adanya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana; 3. Belum optimalnya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana 4. secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu; 5. Belum terselesaikan sepenuhnya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah 6. pascabencana secara terpadu dan menyeluruh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akseibilitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi serta informasi tentang permasalahan RTRW daerah dapat digunakan sebagai dasar acuan penentuan daerah rawan bencana, ditinjau berdasarkan data-data kemiringan diatas 45 derajat, topografi, geografi, demografi, hidrologis, eksplorasi SDA serta untuk kawasan industri.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan dasar rencana bagi penyusunan RTRW diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Mengurangi potensi timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
2. Mengurangi terjadinya intensitas bencana banjir, tanah longsor atau kekeringan dari daerah-daerah yang mengalami masalah ekologis;
3. Mencegah penurunan potensi mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat;

Adapun hasil telaahan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan kesesuaian Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis termuat dalam table berikut :

Tabel 3.3**Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

No	Jenis Kegiatan SKPD yang terkait dengan tata ruang	Kesesuaian dengan Tata Ruang (ya/tidak)	Ket
1	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kemiringan diatas 45 derajat	ya	-
2	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan topografi	ya	-
3	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan Geografi	ya	-
4	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan demografi	ya	-
5	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan hidrologis	ya	-
6	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan eksploitasi SDA	ya	-
7	Penentuan daerah rawan bencana berdasarkan kawasan industri	ya	-

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BPBD dalam gugus tugas dan fungsinya bertugas sebagai koordinator sekaligus pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi :



1. Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
2. Mengkoordinir Penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3. Melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya serta melihat permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar sebagaimana tertuang di dalam RPD Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026, maka isu strategis yang telah dirumuskan terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi SKPD

No.	Isu-isu Strategis dalam RPD	Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi
1.	Akseibilitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	1. Belum memadainya gedung kantor dan gudang penyimpanan peralatan penanggulangan bencana yang representative. 2. Masih kurangnya jumlah dan belum optimal Sumbef Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana. 3. Penyusunan program dilaksanakan per sector dan tidak terpadu. 4. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat sadar bencana.



No.	Isu-isu Strategis dalam RPD	Isu-Isu Strategis sesuai Tugas dan Fungsi
		<ol style="list-style-type: none">5. Pemahaman dan persepsi kebencanaan masih sangat rendah.6. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami.7. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau.8. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.9. Perlunya Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standar.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, terutama yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penetapan tujuan dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama terkait kebencanaan yang ada di Provinsi Kalbar.

Tujuan dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Tujuan RPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 dimana Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan dengan Indikator Indeks Resiko Bencana.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara nyata dan terukur dalam jangka waktu tahunan sampai 3 (tiga) tahun mendatang. Sasaran dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 mengacu Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Menurunnya Resiko Bencana dengan Indikator Indeks Resiko Bencana dimana dalam kurun waktu tiga tahun mendatang yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat

Adapun tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Provinsi Kalimantan Barat, terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 4 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target			Target Akhir Periode
					2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana		INDEKS RESIKO BENCANA	136,72	135,00	133,00	130,00	130,00
		MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PERSENTASE PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100%	90%	90%	90%	90%
		MENINGKATNYA IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDEKS RB NILAI SAKIP	CC B	CC B	B A	B A	B A



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah berbagai langkah yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif, yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Strategi diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra secara optimal. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan yang diambil dapat bersifat internal maupun eksternal.

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang termuat didalam dokumen RPD Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026, dan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana2. Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana3. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



BAB VI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
KERANGKA PENDANAAN**

Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD serta RENSTRA yang terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan dan sub kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan, akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Barat serta RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan.

Adapun Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar dalam sisa waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintah Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana serta Sub Urusan Kebakaran.

2. Program Penanggulangan Bencana :

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baik itu Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial.



3. Program Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Program ini memuat berbagai kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama 3 (tiga) tahun beserta indikator kinerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2024-2026**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp								
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat				0,00		0,00		0,00		0,00						
			Meningkatnya ketahanan daerah dalam bencana	Indeks Resiko Bencana	138,69 poin	135 poin	0,00		133 poin		0,00		130 poin		0,00				
				PERSENTASE PELAYANAN PENANGGULANGAN	100%	90%	0,00		90%		0,00		90%		0,00				
				INDEKS RB NILAI SAKIP	CC B	CC B	0,00		B A		0,00		B A		0,00				
			TIDAK MEMILIKI PROGRAM		0		0,00				0,00				0,00				
			PROGRAM YANG TIDAK MEMILIKI TUJUAN DAN SASARAN				0,00				0,00				0,00				
			TIDAK MEMILIKI SASARAN				0,00				0,00				0,00				
			1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	60	60	9.515.500.000,00		70		10.112.600.000,00		70		10.835.700.000,00		30.463.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan / Dokumen	7 Laporan / Dokumen	470.000.000,00		7 Laporan / Dokumen		495.000.000,00		7 Laporan / Dokumen		520.000.000,00		1.485.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00		2 Dokumen		230.000.000,00		3 Dokumen		240.000.000,00		690.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
			1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00		3 Laporan		85.000.000,00		3 Laporan		90.000.000,00		255.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	4 Laporan	100.000.000,00	4 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	6.325.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	6.565.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	7.110.000.000,00	Laporan / Dokumen	20.000.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ Bulan	38 Orang/ Bulan	5.900.000.000,00	38 Orang/ Bulan	6.100.000.000,00	38 Orang/ Bulan	6.200.000.000,00	114 Orang/ Bulan	18.200.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	230.000.000,00	1 Dokumen	240.000.000,00	3 Dokumen	690.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	4 Dokumen	35.000.000,00	4 Dokumen	40.000.000,00	12 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	35.000.000,00	2 Laporan	40.000.000,00	6 Laporan	105.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	55.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	3 Dokumen	525.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	110.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	110.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	110.000.000,00	Laporan / Dokumen	330.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	N/A Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	3 Laporan	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	3 Laporan	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	3 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	N/A Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	3 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	260.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	287.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	300.000.000,00	Laporan / Dokumen	847.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	10.000.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	66 Paket	80.000.000,00	66 Paket	80.000.000,00	66 Paket	80.000.000,00	198 Paket	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	3 Dokumen	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	17.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	3 Dokumen	52.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A Orang	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	5 Orang	50.000.000,00	15 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A Orang	10 Orang	20.000.000,00	10 Orang	20.000.000,00	10 Orang	20.000.000,00	30 Orang	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A Orang	10 Orang	35.000.000,00	10 Orang	40.000.000,00	10 Orang	50.000.000,00	30 Orang	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	630.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	705.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	780.000.000,00	Laporan / Dokumen	2.115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A Paket	5 Paket	25.000.000,00	5 Paket	30.000.000,00	5 Paket	35.000.000,00	15 Paket	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A Paket	3 Paket	70.000.000,00	3 Paket	75.000.000,00	3 Paket	80.000.000,00	9 Paket	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A Paket	3 Paket	15.000.000,00	3 Paket	20.000.000,00	3 Paket	25.000.000,00	9 Paket	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A Paket	3 Paket	20.000.000,00	3 Paket	25.000.000,00	3 Paket	30.000.000,00	9 Paket	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	5 Paket	50.000.000,00	5 Paket	60.000.000,00	15 Paket	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	12 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	N/A Paket	4 Paket	20.000.000,00	4 Paket	25.000.000,00	4 Paket	30.000.000,00	12 Paket	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	135.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	1 Laporan	320.000.000,00	1 Laporan	340.000.000,00	3 Laporan	960.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	3 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	260.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	350.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	340.000.000,00	Laporan / Dokumen	950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A Paket	3 Paket	70.000.000,00	3 Paket	80.000.000,00	3 Paket	90.000.000,00	9 Paket	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	3 Unit	30.000.000,00	3 Unit	35.000.000,00	3 Unit	40.000.000,00	9 Unit	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	7 Unit	30.000.000,00	7 Unit	35.000.000,00	7 Unit	40.000.000,00	21 Unit	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	N/A Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	50.000.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	6 Unit	60.000.000,00	6 Unit	70.000.000,00	6 Unit	80.000.000,00	18 Unit	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A Unit	7 Unit	70.000.000,00	7 Unit	80.000.000,00	7 Unit	90.000.000,00	21 Unit	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	950.500.000,00	1 Laporan / Dokumen	990.600.000,00	1 Laporan / Dokumen	1.030.700.000,00	Laporan / Dokumen	2.971.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	600.000,00	1 Laporan	700.000,00	3 Laporan	1.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	1 Laporan	280.000.000,00	1 Laporan	290.000.000,00	3 Laporan	840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	620.000.000,00	1 Laporan	640.000.000,00	1 Laporan	660.000.000,00	3 Laporan	1.920.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	510.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	610.000.000,00	1 Laporan / Dokumen	645.000.000,00	Laporan / Dokumen	1.765.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A Unit	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	2 Unit	50.000.000,00	6 Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	250.000.000,00	21 Unit	260.000.000,00	21 Unit	270.000.000,00	63 Unit	780.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	0,00	Unit	0,00	Unit	0,00	Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
		1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	Unit	0,00	Unit	0,00	Unit	0,00	Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI					
		1.05.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	N/A Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	60.000.000,00	1 Unit	60.000.000,00	1 Unit	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT				
		1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	80.000.000,00	3 Unit	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT				
		1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A Unit	6 Unit	80.000.000,00	6 Unit	90.000.000,00	6 Unit	95.000.000,00	18 Unit	265.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT				
		1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A Unit	7 Unit	70.000.000,00	7 Unit	80.000.000,00	7 Unit	90.000.000,00	21 Unit	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT				
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	INDEKS PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	N/A poin	0,44 poin	5.210.000.000,00	0,44 poin	4.825.000.000,00	0,45 poin	5.270.000.000,00	0,45 poin	15.305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI					
				INDEKS SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	N/A poin	0,38 poin	0,00	0,38 poin	0,00	0,39 poin	0,00	0,39 poin	0,00						
				INDEKS PENANGANAN TEMATIK KAWASAN	N/A poin	0,32 poin	0,00	0,32 poin	0,00	0,33 poin	0,00	0,33 poin	0,00						
				INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI	N/A poin	0,4 poin	0,00	0,4 poin	0,00	0,41 poin	0,00	0,41 poin	0,00						
				INDEKS PENKAJIAN RESIKO DAN PERENCANAAN	N/A poin	0,4 poin	0,00	0,4 poin	0,00	0,4 poin	0,00	0,4 poin	0,00						
				INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI	N/A poin	0,52 poin	0,00	0,52 poin	0,00	0,52 poin	0,00	0,52 poin	0,00						
		1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA YANG DILAKUKAN	100 %	100 %	470.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	710.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI					
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI					
		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	N/A Orang	60 Orang	120.000.000,00	60 Orang	120.000.000,00	60 Orang	120.000.000,00	180 Orang	360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA YANG DILAKUKAN	100 %	100 %	1.930.000.000,00	100 %	1.790.000.000,00	100 %	2.150.000.000,00	100 %	5.870.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0	60 Orang	120.000.000,00	60 Orang	140.000.000,00	60 Orang	160.000.000,00	180 Orang	420.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	N/A Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	3 Dokumen	240.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	N/A Unit	7 Unit	450.000.000,00	7 Unit	500.000.000,00	7 Unit	550.000.000,00	21 Unit	1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	140.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	3 Dokumen	420.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	N/A Kawasan	2 Kawasan	350.000.000,00	2 Kawasan	370.000.000,00	2 Kawasan	390.000.000,00	6 Kawasan	1.110.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	N/A Orang	60 Orang	150.000.000,00	60 Orang	170.000.000,00	60 Orang	190.000.000,00	180 Orang	510.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	3 Dokumen	750.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	N/A Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	160.000.000,00	3 Laporan	420.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT
		1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	0	1 Dokumen	300.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANT AN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA YANG DILAKUKAN	100 %	100 %	1.810.000.000,00	100 %	1.880.000.000,00	100 %	1.950.000.000,00	100 %	5.640.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	N/A Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00	1 Laporan	390.000.000,00	1 Laporan	410.000.000,00	3 Laporan	1.170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	N/A Orang	5.000 Orang	400.000.000,00	5.500 Orang	420.000.000,00	6.000 Orang	440.000.000,00	16.500 Orang	1.260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	1 Laporan	920.000.000,00	1 Laporan	940.000.000,00	3 Laporan	2.760.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.03.06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	N/A Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PERSENTASE PELAKSANAAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA YANG DILAKUKAN	100 %	100 %	1.000.000.000,00	100 %	1.035.000.000,00	100 %	1.050.000.000,00	100 %	3.085.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	N/A Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	1 Dokumen	90.000.000,00	3 Dokumen	270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	N/A Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	90.000.000,00	1 Laporan	90.000.000,00	3 Laporan	270.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	N/A Keluarga	30 Keluarga	70.000.000,00	30 Keluarga	70.000.000,00	30 Keluarga	70.000.000,00	90 Keluarga	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	0	2 Dokumen	600.000.000,00	2 Dokumen	620.000.000,00	2 Dokumen	620.000.000,00	6 Dokumen	1.840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE LAYANAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	N/A %	100 %	1.590.000.000,00	100 %	1.745.000.000,00	100 %	1.700.000.000,00	100 %	5.035.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	PERSENTASE PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	N/A %	100 %	1.450.000.000,00	100 %	1.595.000.000,00	100 %	1.540.000.000,00	100 %	4.585.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	
		1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	N/A Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	N/A Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	N/A Unit	5 Unit	550.000.000,00	5 Unit	600.000.000,00	5 Unit	650.000.000,00	15 Unit	1.800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.04.1.01.07	Standarsasi Sarana dan Prasarana Pencearian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencearian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencearian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencearian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	N/A Unit	2 Unit	200.000.000,00	2 Unit	250.000.000,00	3 Unit	300.000.000,00	7 Unit	750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A Orang	60 Orang	70.000.000,00	60 Orang	75.000.000,00	60 Orang	80.000.000,00	180 Orang	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	N/A Kabupaten/Kota	1 Kabupaten/Kota	50.000.000,00	1 Kabupaten/Kota	55.000.000,00	1 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	3 Kabupaten/Kota	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	N/A Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	55.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	3 Dokumen	165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.01.13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	N/A Keluarga	30 Keluarga	60.000.000,00	30 Keluarga	65.000.000,00	30 Keluarga	70.000.000,00	90 Keluarga	195.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	N/A %	100 %	140.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	160.000.000,00	100 %	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
		1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	N/A Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	80.000.000,00	3 Laporan	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI	KALIMANTAN BARAT



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026 telah diselaraskan dengan dokumen RPD Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026. Hal tersebut telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah .

Berdasarkan dokumen RPD Provinsi Kalbar Tahun 2024 – 2026, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggungjawab pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

TUJUAN	:	Mewujudkan Perekonomian yang Tumbuh, Inklusif dan Berkelanjutan
SASARAN	:	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan guna mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran sebagaimana dikemukakan diatas.

Adapun indikator sasaran yang telah di tetapkan oleh perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar yang mengacu pada sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal				Target Akhir Periode
			2021	2022	2023	
1	INDEKS RESIKO BENCANA	138,49	129,00	128,00	127,00	127,00
	PERSENTASE PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100%	90%	90%	90%	90%
	INDEKS RB	CC	CC	B	B	B
	NILAI SAKIP	B	B	A	A	A



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana (Rencana Kerja) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen RENSTRA Perangkat Daerah juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan.

RENSTRA Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 ini disusun dengan memuat berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalbar. Selain itu, keberadaan dokumen ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian RENSTRA Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 ini disusun, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif didalam upaya membangun Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak,

2024

KEPALA BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE., ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19660719 199311 1 002